

Konsep Pluralis-Multikultural dan Implementasi dalam Dunia Pendidikan

Said Subhan Posangi

Dosen tetap di IAIN Sultan Amai Gorontalo

Abstract: Indonesia consists of various racial, ethnic, or religious group. Therefore, need awareness of the Society to perform in a more understanding and assessment in education. Discourse on diversity must be addressed wisely so as not to bring any conflict, as had happened some time ago. Pluralist-multicultural concept seems appropriate to be applied in education as an understanding and assessment of diversity in Indonesia to raise harmony together and prevent the conflict. Education made special shots because this is where the search process beginning stock of one's life meaning. In education will form a value system that directs a person to move and act based on the value system that he belong to.

Keywords: *Concept, Pluralist, Multicultural, and Education.*

Pendahuluan

Sebuah isu global yang kian mengemuka saat ini adalah konsep pluralisme agama. Oleh karena itu, jika memperbincangkan konsep pluralis-multikultural dalam pendidikan di tengah kahidupan masyarakat yang masih sangat rawan terseret dalam dunia konflik yang bemuansa SARA seperti saat ini tentunya masih sangat signifikan. Ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menghimbau Departemen Agama agar mengembangkan pola pendidikan agama yang berwawasan multikultural (Oktober 2001), hingga saat ini belum muncul respon yang positif terhadap pelaksanaannya.

Wacana pendidikan plural-multikulturalisme memang cukup hangat dibicarakan di sejumlah mass media, bahkan menjadi kajian intensif di forum-forum diskusi ilmiah, tetapi hal ini tidak diikuti dengan upaya sungguh-sungguh untuk memformulasikannya dalam gagasan yang aplikatif. Upaya mem-

promosikan konsep pendidikan multikultural sebagai bagian dari upaya meredam potensi konflik horizontal maupun vertikal yang kerap terjadi saat ini akibat salah paham soal SARA, belum berjalan secara menggembirakan. Para elit politik dan elit agama, atau para ahli ilmu sosial di dalam menganalisis akar persoalan konflik yang sering terjadi saat ini, cenderung untuk menjadikan kesenjangan ekonomi dan sosial sebagai penyebabnya. Sangat sedikit yang berani mengatakan kalau sebetulnya persoalan konflik dan kekerasan yang terjadi saat ini berkait erat dengan praktik pengajaran (pendidikan) agama dan moral yang belum banyak menyentuh pada persoalan bagaimana memupuk kerukunan hidup beragama.

Sebagai implikasinya, upaya-upaya memperlunak kebekuan dan mencairkan kekakuan pemikiran keagamaan dan kemanusiaan dari masing-masing agama dan budaya belum dianggap terlalu penting untuk digiring ke dunia pendidikan. Mulai dari segi materi sampai metodologi yang diajarkan di sekolah, pesantren, seminari, dan masyarakat pada umumnya, memiliki kecenderungan untuk mengajarkan pendidikan agama secara parsial. Materi pendidikan agama misalnya, lebih terfokus kepada masalah fikih, aqidah, dan masalah keyakinan seorang hamba dengan Tuhannya. Seakan-akan masalah surga atau kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan "ibadah" dan "akidah" saja. Sebaliknya, pendidikan keagamaan sangat kurang peduli terhadap isu-isu umum (*al-abwal al-ummah*) semacam sikap anti korupsi, wajibnya transformasi sosial dan kepedulian terhadap sesama.¹

Saat ini, konsep pendidikan pluralis-multikulturalisme yang berintikan pada penekanan upaya internalisasi dari karakterisasi sikap toleransi terhadap perbedaan agama, ras, suku, adat, dan lain-lain di kalangan peserta didik sudah sangat dibutuhkan. Kondisi dan situasi bangsa ini belum benar-benar pulih dari ancaman konflik etnis dan agama yang berdarah-darah. Bukan tidak mungkin kalau serangkaian kerusuhan yang terjadi sebut saja, Poso, Ambon, Maluku, Sampit dan lain-lain sewaktu-waktu bisa meledak jika tanpa langkah antisipatif secara dini. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis mengungkapkan konsep pluralis-multikultural dalam pendidikan, dengan pertanyaan, Bagaimana konsep pluralis-multikultural dalam dunia pendidikan?

Sekilas tentang Akar Konsep Pluralitas-Multikultural

Jika dikaji, sebetulnya konsep multikulturalisme relatif baru dibandingkan konsep pluralitas (*plurality*) maupun keragaman (*diversity*). Konsep multikultural muncul pertama kali sekitar tahun 1970-an di Kanada, Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman.² Jika konsep pluralitas mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu; keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu, mereka adalah sama di dalam ruang publik sehingga dibutuhkan kesediaan menerima kelompok lain secara bersama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Pluralitas dan multikultural menunjukkan adanya aspek perbedaan dan keragaman budaya, etnis, bahasa, dan agama.

Wacana multikulturalisme untuk konteks Indonesia mulai mengemuka ketika sistem nasional yang otoriter-militeristik ini menjadi lemah saat jatuhnya rezim Soeharto. Ketika itu, keadaan negara menjadi kacau-balau ditandai dengan terjadinya konflik antarsuku bangsa dan golongan sehingga menimbulkan keterkejutan yang amat sangat mengerikan bagi masyarakat. Keadaan demikian ini, kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar: sebetulnya sistem nasional macam apa yang cocok bagi negara kita Indonesia ini, yang bisa membuat suku bangsa dan golongan hidup damai serta dapat meminimalkan potensi konflik yang ada?

Dari pertanyaan inilah kemudian, dalam sebuah seminar "Menuju Indonesia Baru", sosiolog UI, Supardi Suparlan, menegaskan bahwa multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengungkapkan perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai sebuah corak kehidupan masyarakat.³ Dalam konteks ini, paling tidak, dapat dipahami bahwa pluralisme-multikulturalisme merupakan jembatan yang mampu mengakomodasi perbedaan-perbedaan.

Oleh karena itu, secara sederhana, bangunan Indonesia baru yang diharapkan lahir dari reformasi saat ini adalah masyarakat pluralis-multikultural Indonesia, atau masyarakat Indonesia berideologi pluralisme-multikulturalisme yang bercirikan: rela dan sadar mengakui perbedaan dalam kesederajatan baik secara

individual maupun secara kebudayaan. Berpijak pada multikulturalisme ini, masyarakat Indonesia pada hakikatnya mengakui dan menerima konstruk budaya yang berlaku umum atau yang bercorak seperti mosaik. Dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar.

Itu sebabnya, prinsip multikulturalisme ini dapat dijadikan sebagai strategi dan pendekatan dalam merajut hubungan antarwarga yang belakangan ini mudah terbawa dalam suasana yang penuh konflik sebagai efek dari era keterbukaan. Sebagai strategi dari sebuah integrasi sosial, maka pluralis-multikulturalisme mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya. Hal ini membawa implikasi dalam bersikap bahwa realitas sosial yang sangat majemuk tak akan menjadi kendala dalam membangun pola hubungan sosial antarindividu penuh toleransi. Mereka akan tumbuh sikap yang dapat menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan perbedaan-perbedaan yang melekat pada tiap entitas sosial dan politiknya.⁴ Pluralisme-multikulturalisme ini merupakan konsep yang ingin membawa masyarakat dalam kerukunan dan perdamaian, tanpa ada konflik dan kekerasan, meski di dalamnya ada kompleksitas perbedaan.

Oleh karena itu, untuk menerapkan konsep pluralisme-multikulturalisme, menuntut kesadaran dari masing-masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman identitas budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian. Hal ini bisa dianalogikan, keanekaragaman budaya bagaikan bintang-bintang di langit yang bertebaran bak mutiara menghiasi jagat raya. Peranan negara dalam konteks ini hanya sekadar memfasilitasi terciptanya toleransi antarentitas sosial budaya, dan bukan memainkan peran intervensi-represif yang dapat menimbulkan resistensi dan radikalisasi kultural sebagaimana terjadi pada rezim Orde Baru. Dengan demikian, diharapkan dengan kesadaran dan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, dan politik, paling tidak akan bisa mereduksi berbagai potensi yang dapat memicu konflik sosial di belakang hari.

Implementasi Konsep Pluralis-Multikultural dalam Dunia Pendidikan

Pada bahasan sebelumnya, telah memperkuat asumsi bahwa betapa paradigma pendidikan pluralis-multikultural sangat bermanfaat dalam membangun solidaritas di antara beragamnya etnis, ras, agama, budaya dan kebutuhan. Implementasi pendidikan yang berwawasan pluralis-multikultural akan membantu siswa untuk mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, agama, budaya, nilai dan kepribadiannya. Agar proses ini berjalan sesuai harapan maka seyogyanya semua pihak mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan diseminasikan melalui lembaga pendidikan serta jika memungkinkan dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum di berbagai jenjang pendidikan, baik lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Apalagi, paradigma multikultural sudah menjadi salah satu *concern* dari UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.²

Dalam konteks ini, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau tidak sepaham dengan ketidaktoleranan, baik itu kepada agama, etnik, maupun hegemoni budaya di tengah kultur monolitik uniformitas global saat ini.

Jika dikaji secara historis, pendidikan multikultural sebagai konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruang yang kosong, namun ada *interest* sosial politik, ekonomi, dan intelektual yang mendorong kemunculannya. Di antara lembaga yang secara khusus disorot karena permusuhan dengan ide persamaan ras pada saat itu adalah lembaga pendidikan. Itu sebabnya pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, suara-suara yang menuntut lembaga pendidikan agar konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin kencang. Mereka menuntut adanya persamaan kesempatan di bidang pekerjaan dan pendidikan. Momentum inilah yang kemudian dianggap sebagai awal mula dari konseptualisasi pendidikan pluralis-multikultural.

Dalam konteks keindonesiaan, memperbincangkan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentumnya pasca-runtuhnya rezim otoriter-militeristik Orde Baru. Secara generik, pendidikan multikultural merupakan konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural ini adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.⁶

Paradigma pendidikan multikultural diharapkan dapat menghapus sikap dan pandangan egoistik, individualistik, dan eksklusif di antara peserta didik. Sebaliknya, peserta didik senantiasa dikondisikan ke arah tumbuhnya pandangan komprehensif terhadap sesama, yaitu sebuah pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan atau terintegrasi dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terdiri atas pluralitas etnis, ras, agama, budaya, dan kebutuhan. Oleh karena itu, cukup proporsional jika proses pendidikan multikultural diharapkan membantu para siswa dalam mengembangkan proses identifikasi terhadap budaya, suku bangsa, dan masyarakat global. Pengenalan kebudayaan artinya, anak dikenalkan dengan berbagai jenis tempat ibadah, lembaga kemasyarakatan, dan sekolah. Pengenalan suku bangsa artinya, anak dilatih untuk hidup sesuai dengan kemampuannya dan berperan positif sebagai salah seorang warga dari masyarakatnya. Sementara itu, lewat pengenalan secara global diharapkan siswa memiliki pemahaman tentang bagaimana mereka bisa mengambil peran dalam percaturan kehidupan global yang dia hadapi.⁷

Harus digarisbawahi, nilai dasar dalam pendidikan multikultural adalah toleransi. Oleh karena toleransi merupakan sikap kewarganegaraan yang aktif, bukan sikap yang spontan, maka sikap toleran tidak akan tertanam dengan sendirinya, tanpa ada usaha sadar untuk menginternalisasikannya. Agar pendidikan lebih multikultural, maka sebagai konsekuensinya adalah pendidikan dan pengajaran harus memperkuat pluralisme dan menentang adanya rasisme,

diskriminasi gender dan bentuk-bentuk lain dari intoleransi dan dominasi sosial. Pada konteks ini, harus dilakukan dengan transformasi kurikulum, model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan peran guru yang lebih multikultural. Menurut Gay's prinsip-prinsip penting dalam menerapkan pendidikan multikultural adalah kurikulum berdasarkan sejarah dan berpusat pada keragaman, berorientasi pada perbaikan, pengajaran mengarah pada keragaman, kurikulum tergantung pada konteks, bersifat menyerap keragaman, dapat diterapkan secara luas, bersifat komprehensif, dan mencakup semua level pendidikan.⁸

Pendekatan dan evaluasi suatu kurikulum tak dapat tidak harus menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Artinya, isi dan bahan ajar di sekolah perlu dipilih yang sungguh menekankan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya dan nilai lain. Misalnya, ketika seorang guru mengajarkan sebuah materi keilmuan perlu memasukan nilai dan tokoh-tokoh dari busaya lain agar siswa mengerti bahwa dalam ilmu itu dikembangkan dalam tiap budaya. Atau jika memberi contoh ilmuwan dan hasil teknologi, ia perlu juga mengambil berbagai budaya dari latar belakang budaya masing-masing, termasuk gender.

Singkatnya, paradigma pendidikan multikultural perlu mewamai model pembelajaran yang diterapkan dalam kelas. Model pembelajaran multikultural tersebut meggunakan berbagai pendekatan berbeda-beda. Pasalnya, seorang guru menyajikan bahan termasuk dalam memberi contoh, dia dituntut memilih yang beraneka nilai. Di samping itu, buku-buku yang ditulis dalam pelajaran pun perlu disusun untuk menghargai budaya lain.

Atas dasar ini, maka pendidikan multikultural sangat menekankan orientasi proses pendidikan pada siswa atau komunitas tertentu, yaitu memungkinkan guru memahami keyakinan serta nilai-nilai sosial budaya siswa dalam konteks kebudayaan masyarakat ketika merancang model pembelajarannya. Para pendidik dalam konteks ini disarankan menggunakan metode-metode yang bersifat antropologis unluk mengidentifikasi kelompok sosial budaya, nilai-nilai serta praktiknya yang mempengaruhi proses berkaryanya. Pendekatan itu juga menyarankan pentingnya mengidentifikasi penggunaan pendidikan yang tanggap budaya, yang secara lebih tegas dapat menunjukkan perbedaan etnik dan sosial budaya di kelas, masyarakat, dan nasional.

Jika konsisten berpegang pada paradigma pendidikan multikultural, maka seorang pendidik (guru) dituntut untuk mau dan mampu menerapkan strategi pembelajaran kooperatif (*cooperative teaching learning*) dalam pergaulan sosial dengan para siswa yang memiliki berbagai sifat yang beragam serta bisa menciptakan suasana belajar yang sangat menyenangkan. Sebuah proses pembelajaran dikatakan menggunakan *cooperative learning* jika bercirikan lima unsur berikut. *Pertama*, adanya saling ketergantungan secara positif (*positive interdependence*). Anggota masyarakat menjalankan peran sebagai pembahas sebuah topik diskusi, penanggap dan pendukung hingga mencapai konsensus.

Kedua, adanya interaksi tatap muka yang membangun. Para siswa berdiskusi, mengajar, dan menjelaskan kepada siswa lain dengan cara membangun seperti memberikan dorongan dan saling membantu dalam belajar. *Ketiga*, adanya pertanggungjawaban secara individual. Para siswa dinilai secara individual. Langkah ini untuk meyakinkan bahwa masing-masing anak telah bekerja sesuai bidang pekerjaan yang menjadi bidang tugasnya. *Keempat*, keterampilan sosial. Para siswa harus mempelajari keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam bekerja dengan yang lain seperti kepemimpinan, mengambil keputusan, membangun kepercayaan, komunikasi dan keterampilan manajemen konflik. *Kelima*, masing-masing kelompok mendiskusikan kemajuan mereka dan memberikan masukan sehingga masing-masing bisa meningkatkan diri.⁹

Cooperative learning akan mendorong anak saling belajar segi-segi positif dari temannya. Pada prinsipnya, mereka terkondisikan dengan proses pembelajaran seorang siswa belajar bersama siswa lain dalam suasana saling menghormati, saling toleransi dan saling memahami. Dalam proses pembelajaran demikian, tentu saja akan dapat menanamkan dan melatih nilai-nilai baru pada diri anak didik sehingga nantinya mereka memiliki spirit multikultural berupa mau hidup rukun dan damai dalam suasana kemajemukan. Itu artinya, akan terjadi perubahan cara berpikir (*intellectual mindshift*) dari sebelumnya yang bercara pandang dan interpretasi sosial budaya sempit dan fanatis terhadap budaya mereka sendiri, berubah menjadi cara pandang dan interpretasi demokrasi-pluralis dan mampu menghargai budaya orang lain.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa; bisa tidaknya wacana pendidikan pluralis-multikulturalisme diterapkan oleh lembaga pendidikan tergantung pada usaha kita bersama. Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan Nasional sebagai pihak yang pantas ditunggu peran aktifnya. Paling tidak, Kemdiknas mau mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk diberlakukan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Konsep multikulturalisme sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah, khususnya bagi daerah-daerah bekas konflik berdarah antarsuku. Jika ide pelajaran multikulturalisme ini jadi dilaksanakan di sekolah-sekolah, maka akan bisa menjadi antisipasi dalam mencegah munculnya konflik berdarah antarsuku bangsa.

Endnotes

¹ Busman Edyar, "RUU Sisdiknas dan Pendidikan Pluralis-Multikultural" dalam *Kompas* 31 Maret 2006.

² Mun'im A. Sirry, "Agama, Demokrasi, dan Multikulturalisme", dalam *Kompas*, 1 Mei 2006.

³ Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural" dalam *ArtikelCMDD*, (Jakarta, CMDD Online), hal. 1. Lihat http://www.scripps.ohio.edu/news/cmdd/ani1.cl_ps.htm

⁴ Agus Subagyo, "Multikulturalisme di Tengah kultur Monolitik dan Uniformitas Global", dalam *Kompas*, 28 Desember 2006.

⁵ UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Lembaran Negara, 8 Juli 2003).

⁶ Conny Semiawan, "Memelihara Integrasi Sosial dan Menegakkan HAM Melalui Pendidikan Multikultural", dalam *Makalah Seminar Integrasi Sosial dan Penegakan HAM* (Ditjen HAM, 14 Sept. 2003), hal. 10.

⁷ Donna M. Gollnick and Philip C. Chinn, *Multicultural Education for Exceptional Children* (ERIC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA, 1991), hal. 6.

⁸ Muhammad Ali, "Pendidikan Pluralis-Multikultural", dalam *Kompas*, 16 April 2006.

⁹ Tjetjep Rohendi Rohidi, "Pendidikan Seni Multikultural", dalam *Kompas*, 23 September 2006.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad. 2006. "Pendidikan Pluralis-Multikultural", dalam *Kompas*, 26 April 2006.
- Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn. 1991. *Multicultural Education for Exceptional Children*. ERIC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA.
- Edyar, Busman. 2006. RUU Sisdiknas dan Pendidikan Pluralis-Multikultural", dalam *Kompas*, 31 Maret 2006.
- Rohendi, Tjetjep. 2006. "Pendidikan Seni Multikultural", dalam *Kompas*, 23 September 2006
- Semiawan, Conny. 2003. "Memelihara Interaksi Sosial dan Menegakkan HAM Melalui Pendidikan Multikultural", dalam *Makalah Seminar Integrasi Sosial dan Penegekan HAM*, Ditjem HAM, 14 September 2003.
- Siry, Mun'im, A. 2006. "Agama, Demokrasi dan Multikulturalisme", dalam *Kompas*, 1 Mei 2006.
- Soekarnoputri, Megawati. 2003. *UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Lembaran Negara.
- Subagyo, Agus. 2001. "Multikulturalisme di Tengah kultur Monolitik dan Uniformitas Global", dalam *Kompas*, 28 Desember 2001.
- Suparlan, Parsudi. TT. "Menuju masyarakat Indonesia yang Multikultural", dalam [http://www.scripps.ohio.edu/news/cmdd/artikel__ps htm](http://www.scripps.ohio.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm).